



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)
Jl. T. Daud No. 5 Medan, Telp./Fax. (061) 4537050**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas	2
1.1.2 Fungsi	2
1.1.3 Struktur	3
1.2 Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi	6
1.3 Peran Strategis	6
1.4 Kekuatan Sebagai Sumber Daya	9
1.4.1 Sarana dan Prasarana.....	9
1.4.2 Sumber Daya Manusia	10
1.5 Sistematika Pelaporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Kinerja	13
2.1.1 Rencana Strategis	13
2.1.2 Visi	14
2.1.3 Misi	14
2.1.4 Tujuan	15
2.1.5 Kebijakan.....	15
2.1.6 Program	16
2.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja	19
3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja.....	39
3.1.2.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	40
3.1.2.2 Permasalahan dan Kendala.....	41
3.1.2.3 Pemecahan Masalah	42
3.2 Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	51

LAMPIRAN

Lampiran I	Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2015 (Tapkin 2015)
Lampiran II	Pernyataan Telah Direviu Tim Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan BLH Provinsi Sumatera Utara dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, memiliki peranan terhadap fungsi dan tugas serta kedudukan Badan tersebut sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, fungsi strategis yang diembannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Lingkungan Hidup adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang maupun untuk kelangsungan dimasa yang akan datang.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini telah dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ada tiga sector yang berperan penting di dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu Sosial, Lingkungan Hidup dan Ekonomi yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai sector Ekonomi di dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga sector tersebut harus berjalan secara seimbang agar dapat tercapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Namun, pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi , antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak (cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan).

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan baik atas pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan dan regulasi yang belum memihak kepada perbaikan kualitas lingkungan secara utuh. Upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan telah dilakukan namun kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

1.1.1 Tugas

Badan Lingkungan Hidup disingkat BLH merupakan institusi yang menangani pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi Sumatera yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan, serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi.

1.1.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Provinsi Sumatera Utara, dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, BLH Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan Amdal, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;

- d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

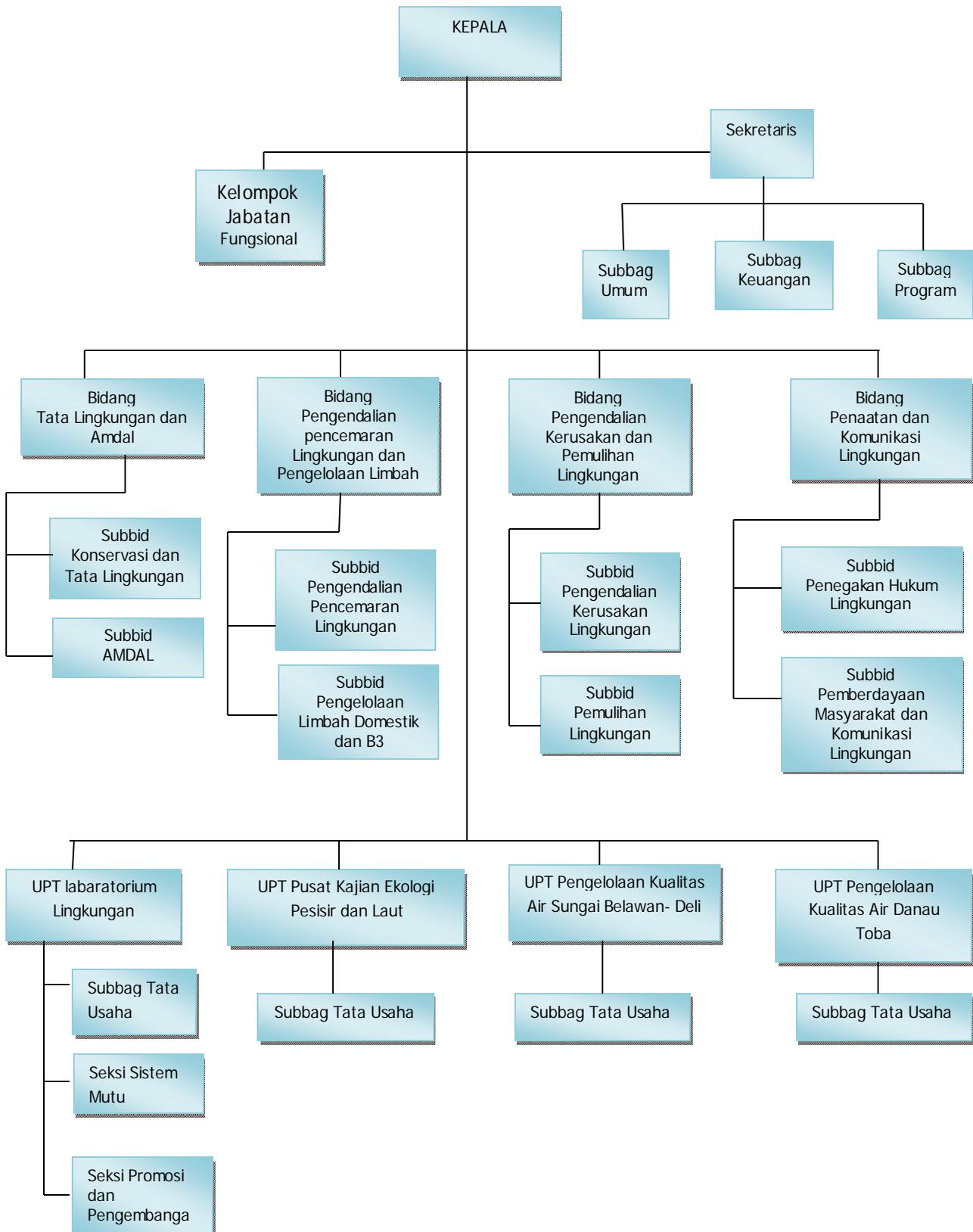
1.1.3 Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbag Umum
 - b) Subbag Keuangan
 - c) Subbag Program
3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri dari :
 - a) Subbid Konservasi dan Tata Lingkungan
 - b) Subbid Amdal
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari :
 - a) Subbid Pengendalian Pencemaran
 - b) Subbid Pengelolaan Limbah Domestik dan B3
5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - b) Subbid Pemulihan Lingkungan
6. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbid Penegakan Hukum Lingkungan
 - b) Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Subbag Tata Usaha
 - b) Seksi Sistem Mutu
 - c) Seksi Promosi dan Pengembangan
8. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Sungai Deli dan Belawan, terdiri dari :

- a) Subbag Tata Usaha
- 9. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, terdiri dari:
 - a) Subbag Tata Usaha
- 10. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, terdiri dari:
 - a) Subbag Tata Usaha
- 11. Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA



1.2 Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara dibentuk sebagai institusi yang diberikan mandat di bidang pembinaan dan koordinasi berkaitan dengan dampak lingkungan di daerah yang diharapkan mampu mengkoordinasikan sistem kerja pengendalian dari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan yang berjalan sehingga akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.3 Peran Strategis

Pengendalian dampak lingkungan, merupakan fungsi yang strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi keberlanjutan pembangunan.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa degradasi dan penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat. Keadaan lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan makhluk lainnya. Kerusakan Hutan akibat kegiatan perambahan hutan ilegal, menimbulkan gangguan terhadap tata air atau neraca air serta berpotensi mengakibatkan bahaya banjir yang semakin serius di musim hujan dan bahaya kekeringan atau krisis air di musim kemarau. Kerusakan Hutan Bakau (Mangrove) dan Terumbu Karang antara lain disebabkan oleh pengembangan tambak dan maraknya industri arang bakau, juga akan mengganggu tatanan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam kawasan ekosistem tersebut.

Selain itu sistem manajemen lingkungan dan teknologi lingkungan yang belum berkembang dengan baik serta pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penegakan hukum yang belum berjalan secara efektif mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih terus berlanjut.

Untuk itu diperlukan rekomendasi pilihan program yang tepat dan tersusun dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut

Program tersebut sejalan dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun ruang lingkup Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi meliputi:

1. Pelayanan informasi status mutu air.

Penetapan status mutu air merupakan tahapan yang penting dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, karena akan menjadi titik tolak untuk pelaksanaan suatu program/kegiatan selanjutnya. Status mutu air juga merupakan hak masyarakat yang harus diakomodir, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, bahwa "setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air".

Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dinyatakan bahwa jika status mutu air dalam kondisi baik atau tidak tercemar, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air perlu dilakukan, dan jika status mutu air berada dalam kondisi cemar, dibutuhkan upaya penanggulangan dan pemulihan dengan menetapkan mutu air sasaran

2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien.

Kualitas udara (ambien) sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkatkan penggunaan energi. Semakin banyak energi yang dibakar pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Udara yang tercemar (tidak memenuhi baku mutu udara ambien) dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) atau bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kadarnya di udara tidak sehat atau berbahaya untuk jangka waktu yang panjang.

Karena tingkat pencemaran udara pada masa yang akan datang akan semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan dan industri serta wilayah permukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup provinsi wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada gubernur atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup provinsi meliputi:

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi di wilayah 4-12 mil laut;

- c. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh komisi penilai AMDAL provinsi;
- d. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat provinsi.

1.4 Kekuatan Sebagai Sumber Daya

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara didukung oleh berbagai sumber daya , antara lain :

1.4.1 Sarana dan Prasarana

a. Kantor

Tabel 1.1 Inventaris Kantor

NO	JENIS GEDUNG	ALAMAT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	SARANA DAN PRASARANA	Keterangan
1	Kantor Badan Lingkungan Hidup	Jl. Teuku Daud No.5 Medan	1983 m2	-	Kantor, Aula, Musholla, Tempat Parkir, Perpustakaan, Gudang Barang dan Garasi, Kamar Mandi, Kantor UPT Belawan Deli	Terdapat Kantor UPT Belawan-Deli
2	UPT. Laboratorium Lingkungan	Jl. H.M. Said No.25 Medan	3782 m2	-	Mini Lab, Musholla, Tempat Parkir, Maket IPAL, Garasi, Ruang GIS, Ruang Gallery LH, Kantor, Aula	-
3	UPT. Pengelolaan Kualitas Air Sungai Deli dan Belawan	Jl. Teuku Daud No.5 Medan	-	102 m2	Ruang Kerja 2 Lantai	Berada di belakang Kantor Badan Lingkungan Hidup
4	UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	Jl. Bukit Barisan No.16 Prapat Kab.Simalungun	-	-	Ruang kepala UPT, Ruangan KTU, Ruang Tamu, Dapur	Sementara menyewa bangunan di dekat rumah penduduk
5	UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut	Jl. Indra Pura No. 12, Belawan	400 m2	250 m2	Aula, Ruang Kerja, Kapal (Boat)	Bangunan dan tanah adalah milik Dinas Perhubungan

b. Kendaraan Dinas

Kendaraan roda dua dan empat yang merupakan alat transportasi dalam menunjang tugas-tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan beban tugas yang diembannya.

Kendaraan roda dua dan empat yang ada saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Inventaris Kendaraan Bermotor

NO	JENIS KENDERAAN BERMOTOR	TYPE	NO.SERTIFIKAT,PABRI K,CHASIS,MESIN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR POLISI	KET
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Honda CRV	MHRRE 3850 BJ100764 K 24ZI-5820745	2011	BK 3 O	APBD
2	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota Kijang Innova	MHFXW 43GOB4056596ITR-7093394	2011	BK 1240 L	APBD
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Mitsubishi L-300	MHML 300DBR 22569509 405601545	2000	BK 1263 H	APBD
4	Kendaraan Dinas Roda 4	Mercedes Benz	-	2001	BK 2389ZQ	BANTUAN AUSTRIA
5	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Delvan	MHCNK 660Y XCO 0042/W000042	2000	B 9379 ZQ	APBN
6	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Delvan	MHCNHR SSEX C000661/N99061	2000	B 9363 ZQ	APBN
7	Kendaraan Dinas Roda 4	Isuzu Delvan	000603M 990 607	2000	B 9384 ZQ	APBN
8	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha RXS 115	MH3-3HB 005-PK10 182 3 HB-077082	1993	BK 2362 H	APBD
9	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha D. 105E	MH34 STO 02 XK23 4875 4ST 2553 74	1999	BK 6777 J	APBD
10	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha V.110E	MH3-3XH 004 TK 270 586 3XA-192063	1996	BK 2916 J	APBD
11	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha LSLM	MH35 LMOD 11K 18715/5LM-018771	2000	BK 2406 K	APBD
12	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha Jupiter MXATCW	MH355S002CK087996 5/55S-087908	2012	BK 2105 L	APBD
13	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha Jupiter MXATCW	MH355S022CK078974/ 55S-078971	2012	BK 2104 L	APBD
14	Kendaraan Dinas Roda 2	Yamaha Jupiter MXATCW	MH355S002CK079097/ 55S-079093	2012	BK 2103 L	APBD
15	Perahu Karet	Yamaha Bombard	TROPIC 380	2001	-	APBD
16	Perahu Karet dengan Mesin Tempel	Yamaha Navy		2006	-	APBD

1.4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2015 berjumlah 166 orang terdiri dari:

a. Menurut Jabatan dan Fungsi

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia BLH Prov SU menurut Jabatan dan Fungsi

NO	Jabatan dan Fungsi	JUMLAH
1	Pejabat Struktural Eselon II	1 orang
2	Pejabat Struktural Eselon III	9 orang
3	Pejabat Struktural Eselon IV	17 orang
4	Staf (Fungsional Umum)	130 orang
5	Fungsional Pejabat Struktural	5 orang
TOTAL		162 orang

b. Menurut Strata Pendidikan :

Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia BLH Prov SU menurut strata pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	2 orang
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA)	48 orang
4	Sarjana Muda/Ahli Madya (D-3)	9 orang
5	Sarjana (S-1)	83 orang
6	Magister (S-2)	18 orang
7	Doktorat (S-3)	2 orang
TOTAL		162 ORANG

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika pembuatan Laporan Kinerja ini terbagi menjadi beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I : **Pendahuluan**, yang berisi :

Latar Belakang, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Mandat, Peran Strategis dan Sistematika Pelaporan

Bab II : **Perencanaan Kinerja**, yang mencakup:

Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Perjanjian dan Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015

Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**, yang berisi :

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi, Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja, permasalahan dan Kendala yang dihadapi serta pemecahan masalah untuk tahun mendatang dan Realisasi Anggaran

Bab IV : **Penutup**, yang berisi:

Kesimpulan dan Saran untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis SKPD

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan Kinerja BLH SU Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada RPJMD Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan Renstra BLH SU Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan sebagaimana perencanaan kinerja tersebut dijabarkan dalam pencapaian sasaran strategis dan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Pencapaian tujuan organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1997, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan diperbaharui lagi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah unsur penunjang Pemerintah Provinsi dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi dampak lingkungan di daerah dimana tugas dan fungsinya merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara setelah tujuan ditentukan maka langkah berikutnya

adalah menentukan sasaran melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan membuat program-program kegiatan.

2.1.2 Visi

Bertitik tolak dari beban tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyiapkan konsep kebijakan pengendalian Lingkungan Hidup, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai **Visi “Menjadi pembina dan koordinator yang handal, profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara”.**

Makna yang terkandung dalam visi di atas adalah bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara secara organisatoris mampu mengarahkan, menggerakkan potensi dan sumber-sumber yang dimiliki, mengkoordinasikan kegiatan dengan dinas sektor di jajaran Provinsi Sumatera Utara dan dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.

2.1.3 Misi

Agar visi yang dirumuskan tersebut dapat direalisasikan dan sekaligus memberi kejelasan tentang tujuan yang akan diwujudkan di samping memberi fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maka Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menetapkan Misi sebagai berikut :

“Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan, pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pengkajian dan evaluasi, pengembangan kelembagaan sumberdaya manusia dan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara”.

2.1.4 Tujuan

Untuk menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) sehingga dapat mewujudkan orang yang beriman, bermoral, beretika dan berbudaya.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya alam (hutan, tanah, keanekaragaman hayati dan lain-lain) dalam mewujudkan masyarakat maju dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.
- 4) Meningkatkan kapasitas instrumen lingkungan hidup dalam mendukung infrastruktur dan ekonomi
- 5) Meningkatkan penataan terhadap peraturan lingkungan hidup
- 6) Meningkatkan frekuensi keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

2.1.5 Sasaran Strategis

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi, dan untuk memantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategi serta kebijakan diperlukan pengukuran dan pendalaman yang kritis dan objektif terhadap faktor – faktor strategis dari kondisi internal dan eksternal Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan mengadopsi arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup tahun 2013–2018, yaitu :

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- Peningkatan kinerja kelembagaan

Sasaran strategis adalah sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2011 tentang indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Adapun sasaran strategis BLH SU adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Terciptanya Lingkungan Hidup yang bersih dalam Rangka menuju Masyarakat yang sehat dan sejahtera
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap ,Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat

2.1.6 Program

Dalam mewujudkan visi dan misinya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menetapkan program kerja sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan yang baik.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera dan tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang di sebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin kerjasama ekosistem, sehingga terjaga sistem kehidupan.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategisnya adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Target yang akan dicapai pada program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, yaitu terjaganya kualitas sumber daya alam berupa air, udara dan tanah sebagai media lingkungan berikut upaya pemulihan dan penanggulangannya dengan melibatkan masyarakat.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Sasarannya adalah tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Program ini bertujuan untuk mengelola dan memulihkan kembali sumber daya alam yang disekitar pesisir dan Laut. Adapun sasaran strategis dari program ini adalah menurunkannya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja BLH SU tahun 2015 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Perjanjian kinerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2015 adalah rencana strategis yang disusun dan digambarkan pada perjanjian kinerja di BLH SU. Perincian lebih lanjut tentang Perjanjian kinerja tersebut adalah seperti tercantum pada lampiran I.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi masing-masing.

Dalam hal ini adalah antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara. Dimana perjanjian kinerja dapat disusun setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi. Dalam pertanggungjawaban ini akan diukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media keberhasilan dan atau kegagalan tersebut diwujudkan dalam ukuran-ukuran kuantitatif sehingga dapat dinilai secara objektif hasil kinerja selama setahun dalam kurun waktu tahun 2015 yang telah dilaksanakan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 dilihat dari pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 48 Tahun 2011.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan strategi dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja *input, output dan outcome*.

Capaian kinerja pada laporan kinerja tahun 2015 diukur dari indikator, input, output dan outcome yang merupakan lanjutan tahun sebelumnya dan erat kaitannya dengan pencapaian sasaran yang ditetapkan Renstra. Hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator kinerja pada tahun 2015 diperoleh tingkat capaian indikator kinerja.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Indikator Kinerja merupakan suatu ukuran, maka syarat-syarat yang diperlukan harus memenuhi kriteria – kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik dan jelas;
- b. Dapat diukur;
- c. Relevan dengan permasalahan;

- d. Dapat dicapai;
- e. Fleksibel dan sensitif;
- f. Efektif.

Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 terdiri dari Realisasi Kinerja dan Anggaran dalam bentuk persentase. Dari hal ini, dapat dilihat bagaimana korelasi pemakaian anggaran dengan keefektifan dari tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai. Realisasi kinerja dicapai berdasarkan Target Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) 2015 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kontrak kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Indikator Kinerja Utama untuk periode 2014-2018. Berikut Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2013	TARGET TAHUNAN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A. Menurunnya tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka terciptanya Lingkungan Hidup yang Bersih menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera	a. Cakupan Pelayanan AMDAL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
B. Tersedianya Data dan Informasi Sumber daya Alam Lingkungan Hidup yang lengkap, Akurat dan Mudah Diakses oleh Semua Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di resptor yang sensitive	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi
	b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi
	c. Publikasi dokumen status lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk melihat capaian dari sasaran strategis yang ditetapkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, dimana sasaran strategis tersebut meliputi:

1. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Indikator kinerja program meliputi:
 - Persentase cakupan pelayanan AMDAL dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebesar 100%.
 - Persentase cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebesar 100%.
 - Jumlah dokumen pemantauan pengelolaan wilayah pesisir dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015 sebanyak 1 dokumen.
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Indikator kinerja program meliputi:
 - Jumlah Lokasi pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebanyak 6 lokasi.
 - Jumlah Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebanyak 5 lokasi.
 - Jumlah Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dengan target kinerja yang ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja awal tahun 2015 sebanyak 1 dokumen.

Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2015 disajikan dalam tabel berikut ini

Dari Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 dapat dilihat pencapaian dari sasaran strategis melalui pencapaian dari masing-masing indikator kinerja. Berikut analisis pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis:

1. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan terciptanya lingkungan hidup yang bersih dalam rangka menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Capaian dari sasaran strategis ini didapat dari rata-rata pencapaian masing-masing indikator kinerja. Semua indikator kinerja dari sasaran strategis ini, mencapai target dengan baik. Berikut indikator kinerja sasaran tersebut:

a. Cakupan Pelayanan AMDAL

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Cakupan Pelayanan AMDAL adalah 100% didapat dari:

Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/RKL-RPL sebanyak 17 perusahaan dan dokumen AMDAL/RKL-RPL yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 juga sebanyak 17 dokumen. Dimana 8 (delapan) dokumen sudah dikeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan 9 (sembilan) dokumen dalam proses pembahasan untuk dikeluarkan SKKL.

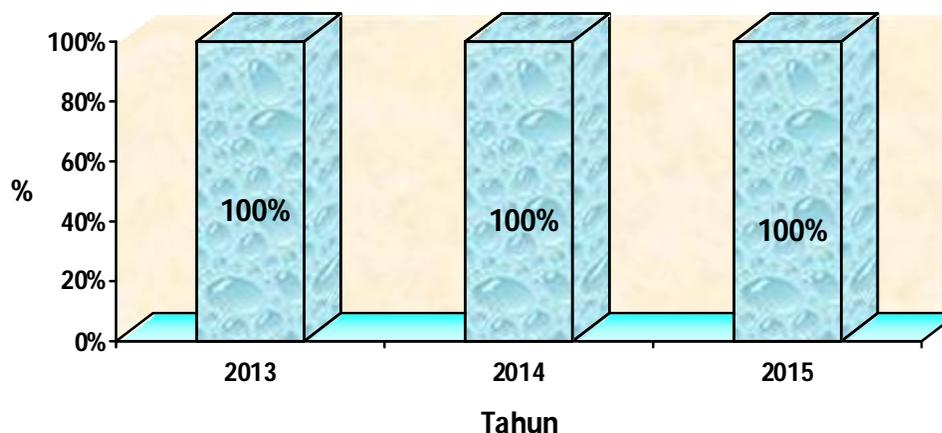
Sedangkan realisasi anggaran yang terpakai untuk menjalankan program/kegiatan yang menjuang pencapaian target kinerja dari indikator ini yaitu sebesar 92,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa keefektifan dan keefisienan kerja dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara baik dimana untuk mencapai target kinerja 100% dari Cakupan Pelayanan AMDAL masih menyisakan dana sekitar 7,90% dari total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini.

Sedangkan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir untuk indikator ini disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan AMDAL 3 tahun terakhir

Tahun	Perusahaan yang mengajukan pembuatan dokumen AMDAL/UKL-UPL	Dokumen AMDAL/UKL-UPL yang sudah selesai dibahas BLH-SU	Capaian Kinerja (%)
2013	20	20	100
2014	8	8	100
2015	17	17	100

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan AMDAL 3 tahun terakhir



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan AMDAL dari tahun ke tahun sangat baik dan memenuhi target 100%.

b. Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup mencapai 100%. Hasil capaian ini didapat dari: Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima instansi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara dalam 1 tahun sebanyak 27 kasus sedangkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti juga sebanyak 27 kasus dimana 2 kasus sudah ditangani di pengadilan dan 25 kasus sedang dalam proses verifikasi yang memerlukan waktu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk menaikkan kasus ke pengadilan.

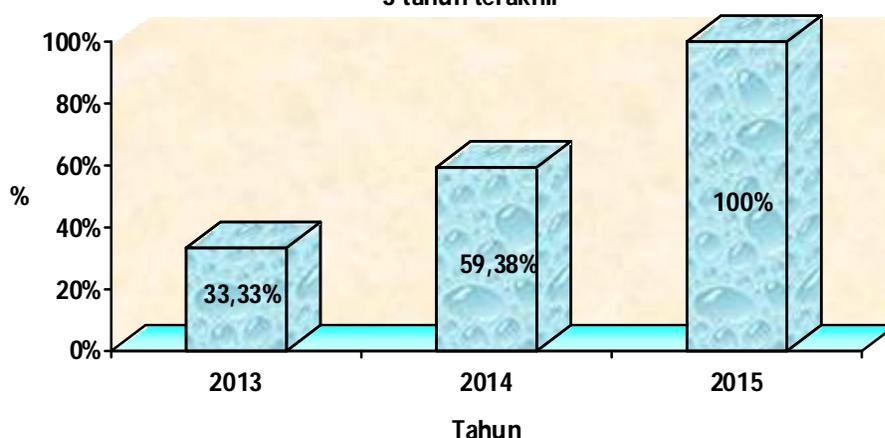
Sedangkan realisasi anggaran yang terpakai untuk melaksanakan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target dari indikator ini yaitu sebesar 84,94 dari total anggaran yang dialokasikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dapat tercapai dengan sangat baik

dengan pemakaian dana yang efektif dan efisien. Sedangkan Capaian Kinerja untuk indikator ini tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja untuk Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup 3 tahun terakhir

Tahun	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Pencapaian Kinerja (%)
2013	15	5	33,33
2014	32	19	59,38
2015	27	27	100

Grafik 3.2 Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Kasus-kasus Lingkungan Hidup 3 tahun terakhir



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup pada tahun 2015 lebih tinggi dari pada pencapaian kinerja tahun 2013 dan 2014. Pencapaian kinerja untuk indikator cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup sangat bergantung dengan adanya kerjasama yang baik antara Badan Lingkungan Hidup dengan para stakeholder termasuk masyarakat dan perusahaan/industri untuk penanganan kasus-kasus lingkungan hidup tersebut.

c. Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir

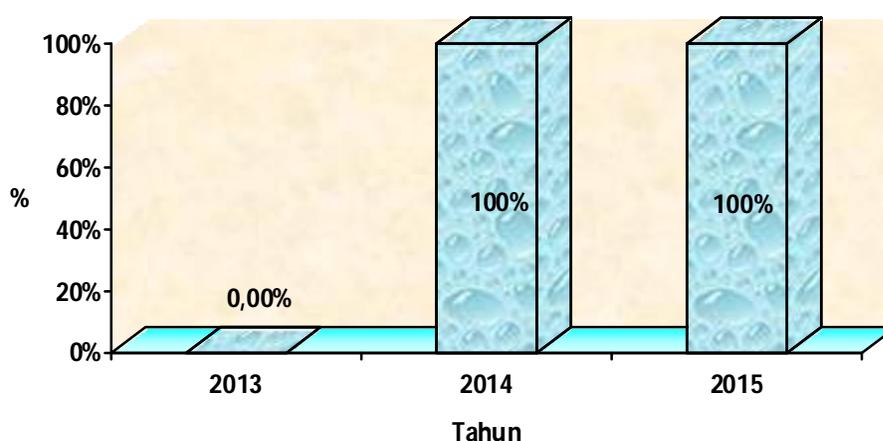
Realisasi kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen. Berarti capaian kinerja memenuhi 100% dari target indikator tersebut. Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan/program yang menunjang pelaksanaan indikator ini yaitu 85,92% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian anggaran yang hanya 85,92% dari anggaran

dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam 3 tahun terakhir

Tabel 3.6 Capaian Kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Tahun	Target Pembuatan Dokumen Pemantauan Pengelolaan Wil. Pesisir	Jumlah Dokumen Pemantauan Pengelolaan Wil. Pesisir yang dibuat	Pencapaian Kinerja (%)
2013	0	0	0
2014	1	1	100
2015	1	1	100

Grafik 3.3 Capaian Kinerja untuk Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir dari tahun ke tahun sangat baik dan memenuhi target 100%. Untuk tahun 2013 belum ada dilakukan pembuatan dokumen Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir disebabkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut masih dalam pendirian dan belum beroperasi dengan optimal.

Dari Tabel 3.2 diatas maka didapatkan pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 89,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis ini dapat mencapai target kinerja 100 % dengan baik secara efektif dan efisien dengan anggaran yang masih tersisa sebesar 10,09% .

2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dari tabel 3.1 dan 3.2 diatas dapat disimpulkan sasaran strategis ini semuanya mencapai target dengan baik yaitu sebesar 100%.

Berikut capaian untuk masing-masing indikator kinerja:

a. Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Status Mutu Air Sungai dan Danau di reseptor yang sensitive sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 lokasi yang terdapat di:

1. Sungai Deli

Pemantauan Sungai Deli dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:.

- Status Mutu air di 3 titik (Sibayakindo, Pertemuan antara S.Deli dan S. Babura, dan Jembatan Brayan) tergolong Cemar Berat.
- Status mutu air di 2 titik (Si Mei-Mei dan Hulu Tirtanadi Deli Tua) tergolong Cemar Sedang.

2. Sungai Belawan

Pemantauan Sungai Belawan dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status mutu air di 4 titik (Jembatan Tuntungan, PT. Everbright, Bendungan Pabrik Gula Sei Semayang, Dekat PT. Rubber Hock Lie, Hilir Tirtanadi Sunggal) pada Sungai Belawan tergolong Cemar Sedang
- Status mutu air di 1 titik yaitu di PT. Everbright pada Sungai Belawan tergolong Cemar Berat

3. Sungai Wampu

Pemantauan Sungai Wampu dilakukan di 6 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status mutu air di 3 titik sampling (Jembatan Sei Bahorok, Jembatan Desa Tanjung Lenggang, Penyeberangan Getek Jumari Desa Perhiasan) pada Sungai Wampu tergolong Cemar Berat.
- Status mutu air di 3 titik sampling (Jembatan Desa Sogong, Jembatan Jl. Umar Baki binjai, Jembatan Desa Stabat) pada Sungai Wampu tergolong Cemar Sedang

4. Sungai Percut

Pemantauan Sungai Percut dilakukan di 5 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status Mutu air di 2 titik (Jembatan Bukum desa Cinta Rakyat, Jembatan desa Sari laba Jahe, Jembatan desa Ajibaho Patumbak, Jembatan Desa Tembung, Jembatan Desa Bandar Setia) tergolong Cemar Sedang.
- Status mutu air di 3 titik (Jembatan Medan Amplas) tergolong Cemar Berat.

5. Sungai Batahan

Status mutu air di 6 titik sampling (Jembatan Gantung Desa Batu, Jembatan Bintungan Bejangkar Baru/Aerapa, Jembatan Bintungan Bejangkar Kampung, Jembatan Rambin trans-1, Jembatan Gantung Simpang Gordes, Lubuk Pusing) pada Sungai Batahan tergolong Cemar Berat.

6. Danau Toba

Pemantauan Danau Toba dilakukan di 22 titik sampling. Berikut status mutu airnya:

- Status Mutu air di 4 titik (Prapat, Lintong, Karo, Salbe) tergolong Sangat Baik.
- Status mutu air di 18 titik (Ajibata, Onan Runggu, Sigaol, Porsea, Balige, Muara, Bakkara, Tao Nainggolan, Palipi, Pangururan, Tao Silalahi, Silalahi, Haranggaol, Simanindo, Ambarita, Tomok, Panahatan) tergolong Cemar Ringan.

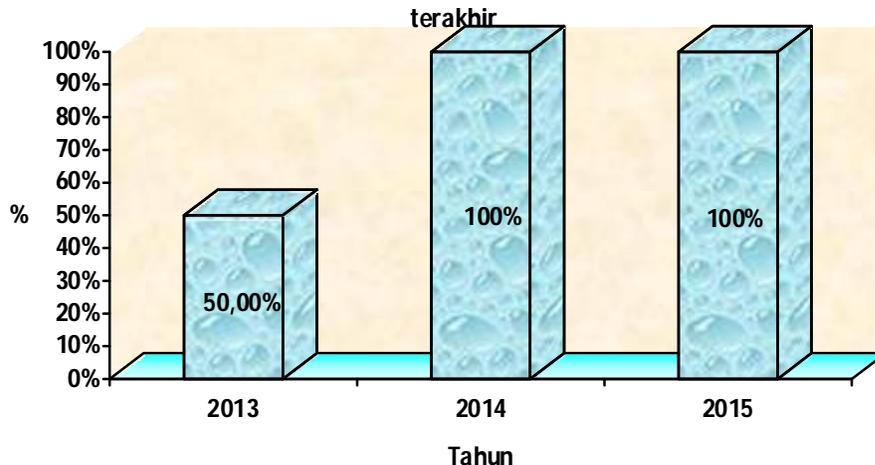
Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini memenuhi 100% target . Sedangkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini sebesar 90,26% dari total anggaran yang dialokasikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara efektif dan efisien untuk mencapai target dari indikator kinerja ini.

Sedangkan Capaian Kinerja dari indikator ini dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Capaian kinerja untuk pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive dalam tiga tahun terakhir

Tahun	Target lokasi pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive	Jumlah lokasi pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive yang terealisasi	Capaian Kinerja (%)
2013	6	3	50
2014	6	6	100
2015	6	6	100

Grafik 3.4 Capaian Kinerja untuk pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive dalam tiga tahun terakhir



Dari Tabel dan Grafik diatas, capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu air sungai dan danau di reseptor sensitive tahun 2014 dan 2015 lebih tinggi dari tahun 2013. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan.

b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu

sebanyak 5 lokasi walaupun hanya dilakukan di 4 kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan satu lokasi pelayanan informasi status mutu udara ambien di Kabupaten Karo sehubungan terjadinya bencana letusan Gunung Sinabung sehingga anggaran pun dialihkan ke lokasi ini. Lokasi-lokasi yang dilakukan Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien adalah sebagai berikut:

- o Kota Medan (Halaman TVRI Medan)
- o Kota Binjai (Lapangan Merdeka Binjai)
- o Kabupaten Deli Serdang (Halaman Kantor Bupati Deli Serdang)
- o Kabupaten Karo-Berastagi (Halaman Kantor Dinas Pariwisata Kab.Karo)
- o Kabupaten Karo (Pos Pemantauan Gunung Sinabung)

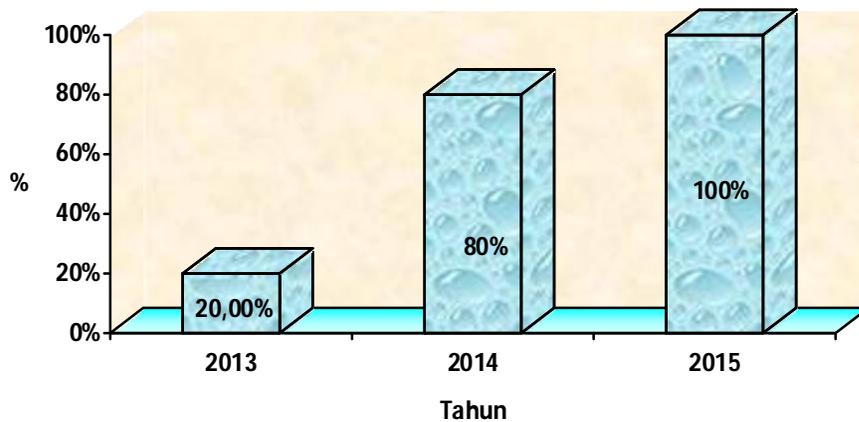
Kualitas Udara untuk parameter SO₂, NO₂, H₂S, NH₃, TSP, Kebisingan secara trend nilai keseluruhan di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo menunjukkan bahwa masih dibawah ambang batas baku mutu kualitas udara ambien.

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja dari Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5 lokasi walaupun hanya dilakukan di 4 kabupaten/kota. Sedangkan Capaian Kinerja dari indikator ini dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Capaian kinerja untuk pelayanan informasi status mutu udara ambien dalam tiga tahun terakhir

Tahun	Target Lokasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Jumlah Lokasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien yang terealisasi	Capaian Kinerja (%)
2013	5	1	20%
2014	5	4	80%
2015	5	5	100%

Grafik 3.5 Capaian Kinerja untuk pelayanan informasi status mutu udara ambien dalam tiga tahun terakhir



Dari Tabel dan Grafik diatas, capaian kinerja untuk indikator pelayanan informasi status mutu udara ambien tahun 2015 merupakan pencapaian tertinggi selama 3 tahun terakhir. Pencapaian kinerja ini sangat bergantung terhadap penyelenggaraan anggaran pada tahun berjalan.

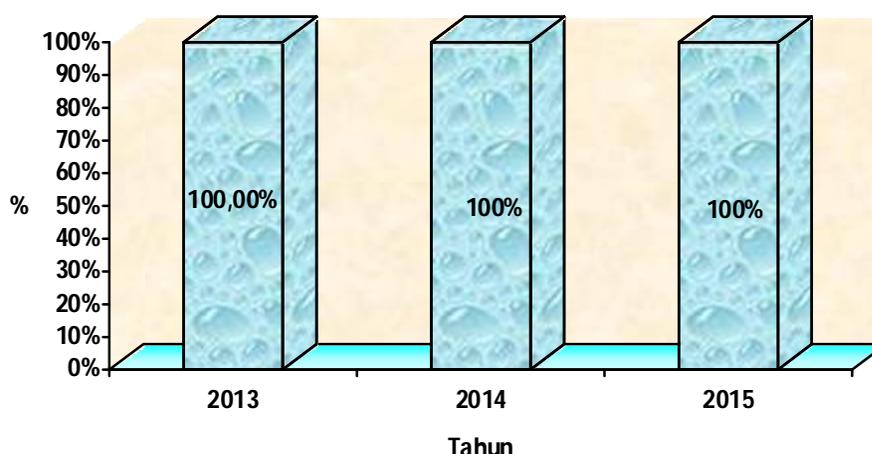
c. Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup

Realisasi Kinerja untuk indikator kinerja dari Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 dokumen. Sehingga capaian kinerja memenuhi 100% dari target. Sedangkan pemakaian anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari indikator ini sebesar 91,64% dari total anggaran yang dialokasikan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara efektif dan efisien untuk mencapai target dari indikator kinerja ini walaupun hampir menghabiskan seluruh anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.9 Capaian kinerja untuk Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dalam tiga tahun terakhir

Tahun	Target Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup	Jumlah Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup yang terealisasi	Pencapaian Kinerja (%)
2013	1	1	100
2014	1	1	100
2015	1	1	100

Grafik 3.6 Capaian Kinerja untuk Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dalam tiga tahun terakhir



Berdasarkan Tabel dan Grafik di atas dapat dilihat BLH Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir selalu melakukan Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup dalam tiga tahun terakhir dengan baik sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% beberapa tahun terakhir.

Dari Tabel 3.2 di atas maka didapatkan pencapaian kinerja sasaran strategis ini dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 89,70% dari total anggaran yang dialokasikan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja BLH Provinsi Sumatera Utara sangat baik dan efektif dikarenakan semua target tercapai dengan anggaran yang masih tersisa sebanyak 10,30%.

3.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk melihat beberapa alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam kaitannya dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran setiap tahunnya disusun pada rencana kerja tahunan berdasarkan sasaran dan tujuan yang terdapat di dalam perencanaan strategis. Indikator sasaran tahun 2015 disusun melalui rencana kerja tahunan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, kemudian ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. Capaian kinerja diukur dari indikator sasaran yang ditetapkan dengan mengaitkan capaian kinerja kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan.

3.1.2.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 4 Secara garis besar, keberhasilan capaian kinerja kegiatan dengan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2015 adalah sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 89,70% dari total anggaran yang dialokasikan. Untuk capaian kinerja sebesar 100% dapat dikatakan sangat baik berdasarkan Tabel klasifikasi capaian kinerja yang telah ditetapkan:

Tabel 3.10 Klasifikasi Capaian Kinerja Tahun 2015

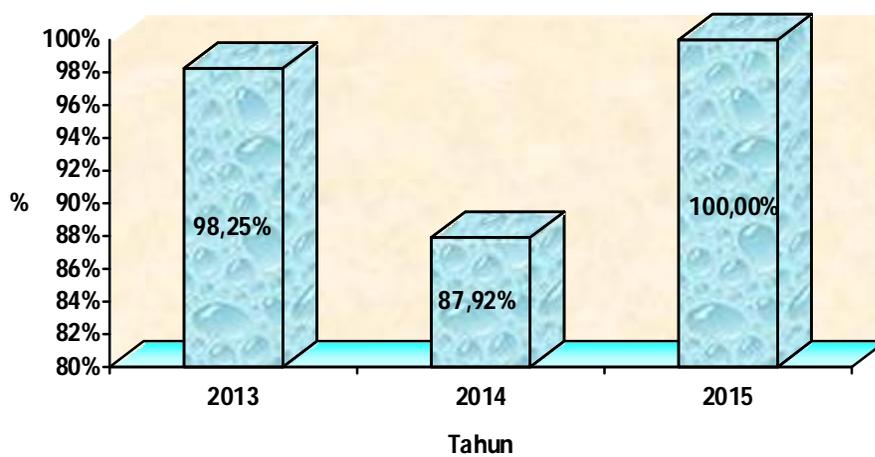
No.	Interval Capaian Kinerja (%)	Deskripsi
1	0-50	Kurang Baik
2	51-65	Cukup Baik
3	66-80	Baik
4	81-100	Sangat Baik

Pencapaian Kinerja pada tahun 2015 merupakan yang terbaik dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar 100% . Berikut Tabel dan Grafik Caian Kinerja BLH-SU dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Capaian Kinerja (%)
1	2013	98,25
2	2014	87,92
3	2015	100

Grafik 3.7 Capaian Kinerja dalam tiga tahun terakhir



Sedangkan untuk capaian pemakaian anggaran pada tahun 2015 ini untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target dari indikator kinerja yaitu sebesar 89,70% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian pemakaian anggaran dapat dikatakan sangat baik sesuai dengan Tabel berdasarkan capaian pemakaian anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.12 Klasifikasi Capaian Pemakaian Anggaran Tahun 2015

No.	Interval Capaian Anggaran (%)	Deskripsi
1	0-50	Kurang Baik
2	51-65	Cukup Baik
3	66-80	Baik
4	81-100	Sangat Baik

Rencana tingkat capaian kinerja ditetapkan 100 % dari 68 (*Enam Puluh Delapan*) kegiatan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan dengan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2015. Pencapaian Kinerja dapat dikatakan sangat baik karena semua target dari 6 (*enam*) indikator kinerja dapat tercapai sebesar 100%.

3.1.2.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang diharapkan, program perlindungan lingkungan hidup belum mampu sepenuhnya menekan lajunya pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga degradasi lingkungan tetap berlanjut, hal ini tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan kendala utama, diantaranya yaitu :

- Lemahnya komitmen Pemda Kab/Kota dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Belum maksimalnya peran Instansi lingkungan hidup daerah mencegah terjadinya permasalahan lingkungan, terkait dengan rendahnya kapasitas lembaga baik dari Sumber Daya Manusia, Peraturan, Organisasi maupun Anggaran serta komitmen aparatur.

- Masih kurangnya pengawasan kegiatan usaha yang menghasilkan sumber pencemar, terkait dengan kurangnya PPLHD, dana, sarana operasional di lapangan
- Belum adanya kesamaan visi PLH antara Instansi Lingkungan dengan sektor untuk menciptakan sinergi kegiatan dalam mewujudkan kualitas air, udara, tanah/habitat yang baik sesuai dayadukung dan baku mutu lingkungan, terkait dengan kurangnya koordinasi dan egosektor.
- Kurangnya data dan informasi lingkungan yang tersedia, sehingga perencanaan program dan kebijakan lingkungan hidup kurang tajam dan belum menjawab permasalahan lingkungan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

3.1.2.3 Pemecahan Masalah

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan permasalahan dan kendala yang dihadapi secara ringkas perlu ditindak lanjuti dengan :

- Pemantapan implementasi program Lingkungan Hidup melalui kesepakatan antar daerah dalam satu ekosistem DAS dengan kerja aksi nyata di lapangan.
- Adanya sinergi program dengan pendekatan lintas sektor dan wilayah administrasi
- Pengembangan kapasitas baik dari jumlah dan kualitas SDM Provinsi, Kab/Kota perlu terus ditingkatkan
- Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap usaha/kegiatan merupakan hal strategis untuk mendorong para pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara efektif.
- Peningkatan terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan kawasan tertentu dapat terlaksana secara maksimal dengan adanya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang terdapat di dalam Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

- PPLH/PPNS yang sudah tersedia di Provinsi/Kab/Kota dapat diberdayakan untuk melaksanakan pengawasan yang intensif terhadap perusahaan dengan memperhatikan pengembangan karir
- Peningkatan peran serta masyarakat perlu terus didorong untuk mempercepat pencapaian hasil pelaksanaan program

3.2 Realisasi Anggaran

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara diamanatkan untuk melaksanakan 4 (empat) Program Pembangunan Bidang Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara T.A 2015 , dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A 2015, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp.30.302.550.304,-** (*tiga puluh juta rupiah*) terdiri dari (1) Belanja Langsung sebesar **Rp. 17.064.882.304,-** (*tujuh belas milyar enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah*) dan (2) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp **13.237.668.000,-** (*tiga belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*). Kemudian karena adanya rasionalisasi anggaran, Badan Lingkungan hidup mendapatkan pengurangan dana kegiatan yang ditampung dalam P.APBD TA. 2015 untuk belanja langsung menjadi **Rp. 12.262.531.064,-** (*Dua belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) dan belanja tidak langsung bertambah menjadi Rp. **13.539.382.000,-** (*Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta*

tiga ratus delapan puluh dua ribu) sehingga total keseluruhan anggaran belanja yang dikelola setelah adanya P.APBD sebesar **Rp. 25.801.913.064,-** (*dua puluh lima juta delapan ratus satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam puluh empat rupiah*). Realisasi penggunaan dana APBD Provinsi Sumatera Utara pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2015 (semester II) untuk belanja langsung sebesar Rp **11.033.175.725,-** (*Sebelas milyar tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), atau 89,97 % dari persentase penggunaan anggaran Tahun 2015. Dapat dilihat penyerapan tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 86,35%.

Tabel 3.13 Realisasi Penggunaan Anggaran 2015

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.776.821.775	3.687.221.775	3.247.023.567	88,06%	440.198.208
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	730.000.000	550.000.000	497.048.498	90,37%	52.951.502
III	Program peningkatan disiplin aparatur	144.000.000	144.000.000	143.550.000	99,69%	450.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	531.950.000	346.950.000	346.815.650	99,96%	134.350
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	673.936.100	527.735.475	510.664.025	96,77%	17.071.450
VI	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	4.635.801.890	3.766.201.890	3.483.230.084	92,49%	282.971.806
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat ADIPURA	70.790.000	70.790.000	69.086.100	97,59%	1.703.900
2	Operasional Komisi PENILAI AMDAL SUMATERA UTARA	210.990.000	210.990.000	196.787.800	93,27%	14.202.200
3	Operasional UPT Lab.BLH-SU	1.206.920.000	1.206.920.000	1.191.316.695	98,71%	15.603.305
4	Penyusunan laporan pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	134.374.200	134.374.200	126.770.650	94,34%	7.603.550
5	Operasional UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	938.000.000	938.000.000	829.989.281	88,48%	108.010.719
6	Operasional UPT Pengelolaan Kualitas Sungai Belawan dan Deli	209.470.000	209.470.000	165.195.910	78,86%	44.274.090

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
7	Penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan LH	110.200.000	110.200.000	93.601.400	84,94%	16.598.600
8	Bimtek Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Terhadap Aparatur Penegak Hukum	80.600.000	-	-	-	-
9	Aksi Gerakan Penyelamatan Sungai (Sungai Deli & Sungai Wampu)	174.000.000	-	-	-	-
10	Pemantauan Kualitas Udara Ambien Mebidangro	91.482.050	91.482.050	89.927.850	98,30%	1.554.200
11	Rapat-rapat Koordinasi daerah tentang pengelolaan Limbah B3	100.000.000	100.000.000	61.820.000	61,82%	38.180.000
12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	55.100.000	55.100.000	53.600.000	97,28%	1.500.000
13	Pembinaan Terhadap Perusahaan Tentang Pengelolaan Limbah B3	73.095.640	73.095.640	72.955.140	99,81%	140.500
14	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Pada Industri di Kawasan Industri Medan (KIM)	53.870.000	53.870.000	48.670.000	90,35%	5.200.000
15	Operasional sekretariat bersama aspek pengelolaan industri kelapa sawit bewawasan lingkungan	55.970.000	55.970.000	50.331.575	89,93%	5.638.425
16	Bimbingan Teknis terhadap perusahaan tentang pengelolaan limbah B3	95.550.000	95.550.000	84.078.888	87,99%	11.471.112
17	Monitoring dan evaluasi status mutu kualitas air sungai lintas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	111.390.000	111.390.000	103.916.296	93,29%	7.473.704
18	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3 terhadap Industri Pengumpul, Pemanfaat dan pengelolaan Limbah B3	69.000.000	69.000.000	66.036.499	95,71%	2.963.501

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
19	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Usaha/Kegiatan Dalam Pengolaan Lingkungan di Sumatera Utara	75.000.000	-	-	-	-
20	Studi Kasus Penegakan Hukum Lingkungan	50.000.000	-	-	-	-
21	Penyusunan Buku Penegakan Hukum Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan di Sumatera Utara	50.000.000	-	-	-	#VALUE!
22	Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	300.000.000	-	-	-	-
23	Pengadaan Tempat Sampah	180.000.000	180.000.000	179.146.000	99,53%	854.000
24	Pelaksanaan Program Car Free Day di Sumatera Utara	140.000.000	-	-	-	-
VI	Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	1.874.438.731	1.361.680.842	1.135.977.209	83,42%	225.703.633
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Kab/Kota	85.857.500	85.857.500	84.334.900	98,23%	1.522.600
2	Evaluasi Baku Mutu Air Danau Toba	100.000.000	-	-	-	-
3	Kajian Pendahuluan Penetapan Baku Mutu Sungai Wampu	90.379.392	90.379.392	79.000.000	87,41%	11.379.392
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat/LSM Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	96.475.000	221.813.000	215.443.000	97,13%	6.370.000
5	Pemantauan Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Hutan Tanaman di Wilayah Kab/Kota	97.747.250	97.747.250	93.369.250	95,52%	4.378.000
6	Fasilitasi dan Pembinaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	78.668.500	78.668.500	76.203.500	96,87%	2.465.000
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Kebersihan Sungai (Piket Sungai)	75.000.000	75.000.000	-	-	75.000.000
8	Operasional Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI)	50.000.000	-	-	-	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
9	Inventarisasi dan Penyusunan Laporan GRK Provinsi Sumatera Utara	75.000.000	75.000.000	-	-	75.000.000
10	Rakornis Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/kota Tahun 2015	187.215.200	187.215.200	176.023.260	94,02%	11.191.940
11	Clean Up Sungai Deli	101.465.789	250.000.000	238.655.000	95,46%	11.345.000
12	Pengadaan Becak Motor Sampah	150.000.000	-	-	-	-
13	Penyusunan Pergub Pengendalian Pencemaran Udara	180.000.000	-	-	-	-
14	Pembuatan Taman di Sempadan Sungai Deli	190.000.000	-	-	-	-
15	Clean Up Danau Toba	60.000.000	-	-	-	-
16	Bimbingan Teknis Standar Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	116.200.000	-	-	-	-
17	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provsu	61.469.100	-	-	-	-
18	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provsu	78.961.000	200.000.000	172.948.299	86,47%	27.051.701
VII	Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	3.085.186.359	1.456.341.082	1.305.936.953	89,67%	150.404.129
1	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	144.500.000	144.500.000	139.278.553	96,39%	5.221.447
2	Pembinaan dan Penilaian Kalpataru 2015	28.300.000	28.300.000	28.250.000	99,82%	50.000
3	Publikasi Lingkungan Hidup melalui Media Cetak dan Elektronik	100.000.000	200.000.000	113.810.000	56,91%	86.190.000
4	Pembinaan dan Penilaian Status Lingkungan Hidup Kab/Kota	74.012.400	200.000.000	168.155.600	84,08%	31.844.400
5	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Sumatera Utara	220.900.800	220.900.800	209.133.200	94,67%	11.767.600
6	Penguatan jaringan data dan informasi Melalui pengembangan sifokom BLH-SU	87.250.000	87.250.000	86.463.600	99,10%	786.400
7	Peringatan Hari LH sedunia Tahun 2015	530.000.000	440.390.282	427.350.000	97,04%	13.040.282
8	Bimtek aplikasi Pengisian Tabel Data Lingkungan Hidup bagi instansi terkait di Prov-Su	150.000.000	-	-	-	-

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
9	Bimtek Aplikasi Pengisian tabel Data LH Kab/Kota	200.000.000	-	-	-	-
10	Pembuatan Miniatur Laboratorium Lingkungan	149.484.026	-	-	-	-
11	Pembuatan Miniatur IPAL Industri di Sumatera Utara	175.000.000	-	-	-	-
12	Penyusunan Profil Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015	190.000.000	-	-	-	-
13	Pembuatan Papan Hibauan Pelestarian Lingkungan Hidup	180.000.000	85.000.000	83.600.000	98,35%	1.400.000
14	Pembuatan Leaflet dan Brosur Lingkungan Hidup	40.000.000	-	-	-	-
15	Publikasi Pelestarian Lingkungan di Danau Toba Melalui Media Elektronik	90.093.364	-	-	-	-
16	Operasional Aku Perempuan Peduli Lingkungan (APEL)	50.000.000	50.000.000	49.896.000	99,79%	104.000
17	Pembinaan Guru Berwawasan Lingkungan	60.055.769	-	-	-	-
18	Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2015	45.000.000	-	-	-	-
19	Pekan Lingkungan Indonesia ke 19 Tahun 2015	71.020.000	-	-	-	-
20	Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup dan Kemah Hijau 2015	205.170.000	-	-	-	-
21	Peningkatan Partisipasi Dekranas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	40.000.000	-	-	-	-
22	Penerbitan Buletin Rona	50.000.000	-	-	-	-
23	Seminar Nasional Lingkungan Hidup Tahun 2015	100.000.000	-	-	-	-
24	Pemetaan Daerah Aliran Sungai Belawan dan Sungai Deli	104.400.000	-	-	-	-
IX	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	612.747.449	422.400.000	362.929.739	85,92%	59.470.261
1	Operasional UPT pusat kajian ekologi pesisir dan laut	422.400.000	422.400.000	362.929.739	85,92%	59.470.261

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA		REALISASI		SISA
		APBD	SETELAH P. APBD	Rp.	%	
2	Pembuatan Galery Pesisir dan Laut di Sumatera Utara	190.347.449	-	-	-	-
JUMLAH		17.064.882.304	12.262.531.064	11.033.175.725	89,97%	1.229.355.339

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Anggaran telah dilaksanakan dengan baik, namun dapat dilihat ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Kebersihan Sungai (Piket Sungai) dengan Pagu sebesar Rp. 75.000.000,-
- Inventarisasi dan Penyusunan Laporan GRK Provinsi Sumatera Utara dengan Pagu Rp. 75.000.000,

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara T.A 2015 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang diemban sesuai dengan program dan kegiatan serta alokasi dana yang tersedia pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pertanggung jawaban ini adalah untuk mengukur tingkat kinerja yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan Kinerja instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 ini disusun untuk melihat berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari capaian sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2015. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Utama (IKU)
3. Hasil capaian kinerja sasaran tahun 2015 yaitu sebesar 100% dan dapat dikatakan sangat baik karena semua target dari indikator kinerja tercapai Hal ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen baik aparatur/jajaran personil maupun stakeholder terkait.
4. Hasil capaian pemakaian anggaran tahun 2015 yaitu sebesar 89,74% masih dapat dikategorikan sangat baik. Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang sebesar 100% maka pemakaian anggaran masih sesuai dan wajar karena selisih pencapaian kinerja dengan pemakaian anggaran sangat kecil dan anggaran masih tersisa sekitar 10,26%.
5. Dengan titik tolak Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018, penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang maka hendaknya:

1. Dalam rangka memaksimalkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas yang diemban oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan khususnya dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara pada umumnya, diperlukan adanya informasi dan komunikasi secara berkelanjutan dan sinergis antar sektor yang ada di Sumatera Utara karena isu lingkungan melibatkan semua komponen kehidupan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan ketersediaan sumber daya serta kemampuan yang ada, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, waktu pelaksanaan kegiatan dan perkembangan masalah-masalah aktual di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu adanya peningkatan mekanisme manajemen internal di dalam lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara supaya dapat secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Medan,

2016

**BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA UTARA,
KEPALA,**

**Dr. Ir. Hj. HIDAYATI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630406 19903 2 002**

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran : 2015

No.	INDKATOR KINERJA	ARGET KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	SETELAH P.A.PBD (Rp.)		
1	2	3	4	5	6		
1	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Terciptanya Lingkungan Hidup yang bersih menuju Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera	1. Cakupan Pelayanan AMDAL	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	839.705.640	839.705.640	
				Operasional komisi penilai AMDAL Sumatera Utara	210.990.000	210.990.000	
				Rapat Koordinasi Daerah Tentang Pengelolaan Limbah B3	100.000.000	100.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan 3 R (Reuse, Reduce, Recycle)	55.100.000	55.100.000	
				Operasional Sekretariat bersama (Sekber) Aspek Pengolahan Industri Kelapa Sawit Berwawasan Lingkungan	55.970.000	55.970.000	
				Bimbingan Teknis terhadap Perusahaan tentang Pengelolaan Limbah B3	95.550.000	95.550.000	
				Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Status Perijinan Pengeolaan Limbah B3 terhadap Industri Pengumpul, Pemanfaat dan Pengolahan Limbah B3	69.000.000	69.000.000	
				Pembinaan terhadap Perusahaan tentang Pengelolaan Limbah B3	73.095.640	73.095.640	
				Pengadaan Tempat Sampah	180.000.000	180.000.000	
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	349.804.750	183.604.750	
			Bimbingan Teknis Standar Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	116.200.000	*		
			Pemantauan Pengendalian Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Hutan Tanaman di Wilayah Kabupaten/Kota	97.747.250	97.747.250		
			Operasional Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI)	50.000.000	*		
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	85.857.500	85.857.500		
			2. Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	100%	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	290.800.000	110.200.000
					Penyelidikan dan Penyidikan Kasus-Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	110.200.000	110.200.000
					Bimtek Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Terhadap Aparat Penegak Hukum	80.600.000	*
					Studi Kasus Penegakan Hukum Lingkungan	50.000.000	*
			3. Pemantauan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 Dokumen	Program Pengelolaan dan Rehabilitas Ekosistem Pesisir Laut	612.747.449	422.400.000
					Operasional UPT. Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut	422.400.000	422.400.000
	Pembuatan Galery Pesisir dan Laut di Sumatera Utara	190.347.449			*		

No.	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	SETELAH P.A.PBD (Rp.)	
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang Lengkap, Akurat dan Mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat	1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air Sungai dan Danau di Resptor yang sensitive	6 Lokasi	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2.993.650.000	2.519.650.000
				Operasional UPT. Laboratorium Lingkungan BLH Sumatera Utara	1.206.920.000	1.206.920.000
				Operasional UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	938.000.000	938.000.000
				Operasional UPT Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan dan Deli	209.470.000	209.470.000
				Aksi Gerakan Penyelamatan Sungai (Sungai Deli & Sungai Wampu)	174.000.000	*
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan pada Industri di Kawasan Industri Medan (KIM)	53.870.000	53.870.000
				Monitoring dan Evaluasi Status Mutu Kualitas Air Sungai Lintas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara	111.390.000	111.390.000
				Pembangunan Gedung Kantor UPT. Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba	300.000.000	*
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	695.806.181	615.379.392
				Evaluasi Baku Mutu Air Danau Toba	100.000.000	*
				Monitoring Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Provinsi Sumatera Utara	78.961.000	200.000.000
				Clean Up Sungai Deli	101.465.789	250.000.000
				Clean Up Danau Toba	60.000.000	*
				Kajian Pendahuluan Penetapan Baku Mutu Sungai Wampu	90.379.392	90.379.392
				Pembuatan Taman di Sempadan Sungai Deli	190.000.000	*
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Kebersihan Sungai (Piket Sungai)	75.000.000	75.000.000
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup	253.884.026	-
				Pembuatan Miniatur Laboratorium Lingkungan	149.484.026	*
				Pemetaan Daerah Aliran Sungai Belawan dan Sungai Deli	104.400.000	*
	2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	5 Lokasi	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	231.482.050	91.482.050	
			Pemantauan Kualitas Udara Ambien Mebidangro	91.482.050	91.482.050	
			Pelaksanaan Program Car Free Day di Sumatera Utara	140.000.000	*	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	286.469.100	75.000.000	
Inventarisasi dan Penyusunan Laporan GRK Provinsi Sumatera Utara			75.000.000	75.000.000		
Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provsu			61.469.100	*		
Pengadaan Becak Motor Sampah			150.000.000	*		

No.	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	SETELAH P.A.PBD (Rp.)
	3 Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	280.164.200	205.164.200
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura			70.790.000	70.790.000	
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan di Sumatera Utara			75.000.000	*	
Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara			134.374.200	134.374.200	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			542.358.700	487.696.700	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat / LSM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			96.475.000	221.813.000	
Fasilitas dan Pembinaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara			78.668.500	78.668.500	
Rakornis Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/Kota Tahun 2015			187.215.200	187.215.200	
Penyusunan Perqub Pengendalian Pencemaran Udara			180.000.000	*	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			2.831.302.333	1.456.341.082	
Publikasi Pelestarian Lingkungan di Danau Toba melalui Media Elektronik			90.093.364	*	
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara			220.900.800	220.900.800	
Pembinaan Program dan Penilaian Sekolah Adiwiyata			144.500.000	144.500.000	
Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2015			45.000.000	*	
Pekan Lingkungan Indonesia ke 19 Tahun 2015			71.020.000	*	
Lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup dan Kemah Hijau 2015			205.170.000	*	
Pembinaan dan Penilaian Kalpataru 2015			28.300.000	28.300.000	
Publikasi Lingkungan Hidup Melalui Media Cetak dan Elektronik			100.000.000	200.000.000	
Pembinaan dan Penilaian Status Lingkungan Hidup Kab/Kota			74.012.400	200.000.000	
Penyusunan Profil BLH Tahun 2015			190.000.000	*	
Peningkatan Partisipasi Dekranas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			40.000.000	*	
Operasional Aku Perempuan Peduli Lingkungan (APEL)			50.000.000	50.000.000	
Pembinaan Guru Berwawasan Lingkungan			60.055.769	*	
Penerbitan Buletin Rona			50.000.000	*	
Penguatan Jaringan Data dan Informasi Melalui Pengembangan SISFOKOM BLH-SU			87.250.000	87.250.000	
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2015			530.000.000	440.390.282	
Bimtek Aplikasi Pengisian Tabel Data Lingkungan Hidup Provsu bagi instansi terkait di Provinsi Sumatera Utara			150.000.000	*	
Bimtek Aplikasi Pengisian Tabel Data Lingkungan Hidup Kab/Kota			200.000.000	*	
Seminar Nasional Lingkungan Hidup Tahun 2015			100.000.000	*	
Pembuatan Miniatur IPAL Industri di Sumatera Utara			175.000.000	*	
Pembuatan Papan Himbauan Pelestarian Lingkungan Hidup	180.000.000	85.000.000			
Pembuatan Leaflet dan Brosur LH	40.000.000	*			
JUMLAH			10.208.174.429	7.006.623.814	

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 :

Jumlah Anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 Jumlah Anggaran Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ,18
 Jumlah Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya
 Jumlah Anggaran Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut,

Rp

Rp
 Rp
 Rp
 Rp

10.208.174.429

4.635.801.890
 1.874.438.731
 3.085.186.359
 612.747.449